

## **KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH DALAM PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**

**Oleh**  
Oktaviani Eka Kumala

### **Abstract**

*Tujuan penelitian ini menggambarkan kinerja BKP2D dalam menangani pelanggaran disipliner terhadap pegawai negeri sipil di pemerintah Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di BKP2D Kabupaten Boyolali. Alat data menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Pengujian validitas data menggunakan teknik triangulasi.*

**Keyword:** pegawai negeri, kinerja, disiplin

---

### **Pendahuluan**

Kinerja pegawai pemerintahan merupakan kemampuan dan motivasi dari dalam diri pegawai negeri sipil sendiri untuk melakukan kebijakan yang berasal dari pemerintahan sehingga menghasilkan kualitas pelayanan yang baik bagi masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi, yang bertitik tolak dari kenyataan buruknya kondisi faktual kualitas pelayanan publik yang sebagian besar ditentukan oleh kualitas sikap, dan karakter aparatur pemerintah yang tidak terpuji, korup, dan tidak bertanggungjawab. Peran birokrasi pemerintah dipandang sebagai yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan suatu negara, maupun untuk memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012).

Di dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Boyolali, terdapat badan yang mengatur dan mengurus kepegawaian yang menyangkut hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil yaitu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D). Badan ini diharapkan dapat menjadi tempat pelayanan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berkaitan dengan disiplin kerja pegawai negeri sipil, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) mempunyai tugas menegakan disiplin pegawai dengan mengadakan pembinaan kepada pegawai yang melakukan pelang-

garan disiplin kepegawaian dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Masyarakat sering mengeluh mengenai aparatur pemerintahan yang tidak transparan dan cenderung untuk menyimpang dari peraturan yang ditetapkan yang terkadang dapat merugikan masyarakat. Hal ini terjadi karena masih rendahnya kualitas dan kuantitas dari aparatur pemerintah. Perbaikan kinerja BKP2D Kabupaten Boyolali harus dilakukan terutama bagaimana menumbuhkan dan meningkatkan disiplin aparatur yang ada di dalamnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang mau tidak mau harus berupaya meningkatkan kemampuannya semaksimal mungkin.

Untuk mengukur kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Kabupaten Boyolali, ketiga indikator tersebut yaitu Responsivitas (*responsivity*), Responsibilitas (*responsibility*), dan Akuntabilitas (*accountability*). Indikator-indikator tersebut dipilih karena ketiga indikator tersebut dinilai oleh penulis sebagai indikator yang lebih sesuai dan dapat berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja organisasi publik khususnya menilai kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Kabupaten Boyolali.

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan masalah yang diangkat dalam penelitian yang menekankan pada proses dan makna, maka bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang bermaksud

memberikan gambaran masalah secara sistematis, cermat, rinci dan mendalam mengenai fenomena yang terjadi dalam Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Kabupaten Boyolali ketika pelaksanaan penanganan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil berlangsung. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, .

Data primer yaitu sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumber yang berkaitan dengan penelitian yaitu dari para informan yang memiliki kompetensi dan pengetahuan untuk memberikan informasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atau bahan informasi lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Bentuknya berupa catatan-catatan, buku-buku literatur, dokumen, laporan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen

Triangulasi data digunakan dengan membandingkan antara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil observasi dan telaah arsip, dokumen, dan artikel dari berbagai sumber.

## **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **1. Responsivitas**

BKP2D Kabupaten Boyolali mampu untuk mengetahui harapan masyarakat mengenai penegakan disiplin negeri sipil dengan merespon aspirasi dari masyarakat. Responsivitas ditunjukkan pada keselarasan antara program dan kegiatan penegakan disiplin dengan laporan yang disampaikan masyarakat, hal ini sangat berpengaruh sebagai ukuran kinerja karena secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi, visi serta tujuannya khususnya dalam menegakkan disiplin pegawai negeri sipil di Kabupaten Boyolali. Apabila tidak terjadi keselarasan, maka merupakan suatu bentuk kegagalan organisasi dalam usaha mewujudkan misi, visi serta tujuan organisasi publik.

Respon yang diharapkan pengguna jasa adalah daya tanggap BKP2D Kabupaten Boyolali dalam melayani dan memenuhi semua kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tanpa prosedur berbelit-belit serta tepat

waktu sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal). Sehingga sikap responsif BKP2D Kabupaten Boyolali dapat terlihat dari sikap para pegawai BKP2D Kabupaten Boyolali dalam menanggapi kebutuhan pengguna jasa, kesesuaian antara tanggapan organisasi terhadap kebutuhan dengan harapan dan aspirasi dari pengguna jasa, serta upaya-upaya yang dilakukan organisasi dalam menanggapi keluhan-keluhan pengguna jasa dan fasilitas yang dapat menunjang responsivitas BKP2D Kabupaten Boyolali.

Mengacu pada upaya yang dilakukan oleh BKP2D Kabupaten Boyolali sebagai wujud responsivitas terhadap masyarakat disimpulkan bahwa secara umum responsivitas BKP2D Kabupaten Boyolali dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna layanannya adalah baik. Namun demikian tetap diperlukan adanya peningkatan daya tanggap dari pegawai BKP2D Kabupaten Boyolali tersebut agar masyarakat semakin puas terhadap pelayanan yang diberikan.

Dalam pelaksanaan penegakan disiplin pegawai negeri sipil di Pemerintah Kabupaten Boyolali, BKP2D Kabupaten Boyolali dalam segi indikator responsivitas dapat dikatakan baik karena dalam kinerjanya mampu dan peka mengenali keluhan masyarakat mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai negeri sipil, menyusun agenda dan prioritas penegakan disiplin serta mengembangkan program-program penegakan disiplin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2. Responsibilitas**

Kesesuaian dengan aturan dan prosedur/syarat yang telah ditetapkan dilakukan oleh BKP2D Kabupaten Boyolali dalam penegakan disiplin pegawai negeri sipil telah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pada dasarnya semua penegakan disiplin pegawai negeri sipil mengacu pada PP Nopmor 53 Tahun 2015.. Kesesuaian dengan peraturan tersebut menyangkut tatacara, aturan, prosedur yang telah ditetapkan dan juga syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan disiplin pegawai negeri sipil di Kabupaten Boyolali.

### **3. Akuntabilitas**

BKP2D Kabupaten Boyolali dalam menegakkan disiplin pegawai negeri sipil

telah bertanggungjawab terhadap para pejabat publik administrasi yang berada di atasnya. Selain bertanggungjawab kepada instansi atasnya, BKP2D Kabupaten Boyolali juga melaporkan hasil penegakkan disiplin kepada kepala dinas/instansi yang di ada lingkup pemerintah Kabupaten Boyolali yang pegawainya melakukan pelanggaran disiplin.

Begitu pentingnya peraturan perundang-undangan untuk menopang penegakkan disiplin pegawai negeri sipil, maka kejelasan prosedur penanganan disiplin pegawai negeri sipil merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan. Seperti yang kita ketahui penerbitan sanksi terhadap pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil merupakan hasil akhir dari berbagai rangkaian proses pelaksanaan penegakkan disiplin pegawai negeri sipil di Kabupaten Boyolali. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa penyelenggaraan pelayanan di BKP2D Kabupaten Boyolali telah dapat dipertanggung-jawabkan kepada pemerintah sehingga akuntabilitasnya dikatakan baik.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui bahwa BKP2D Kabupaten Boyolali dalam menegakkan disiplin di Kabupaten Boyolali telah berupaya menegakkan kedisiplinan dengan baik. Kinerja BKP2D Kabupaten Boyolali dalam penegakan disiplin pegawai negeri sipil dengan menggunakan tiga indikator responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Responsivitas BKP2D Kabupaten Boyolali dalam penegakan disiplin pegawai negeri sipil dibuktikan dari sikap responsif dari BKP2D Kabupaten Boyolali terhadap laporan pelanggaran disiplin dari masyarakat serta menangani perkara kedisiplinan secara cepat dan akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga dilakukannya sosialisasi terhadap PP Nomor 53 Tahun 2010 kepada seluruh instansi atau dinas yang di Kabupaten Boyolali melalui apel atau upacara serta rapat koordinasi BKP2D Kabupaten Boyolali dengan dinas atau instansi di lingkup pemerintah kabupaten Boyolali..

Responsibilitas BKP2D Kabupaten Boyolali dalam penegakan disiplin pegawai negeri sipil di Kabupaten Boyolali

ditunjukkan dengan BKP2D Kabupaten Boyolali dalam penegakkan disiplin telah sesuai dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. BKP2D Kabupaten Boyolali dalam penetapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil di Kabupaten Boyolali selalu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas BKP2D Kabupaten Boyolali dalam penegakan disiplin pegawai negeri sipil di Kabupaten Boyolali ditunjukkan dengan laporan pertanggungjawaban kepada para pejabat yang berada di atasnya dalam bentuk pemberian laporan secara berkala. Secara struktural laporan pertanggung-jawaban BKP2D Kabupaten Boyolali diserahkan langsung kepada Bupati yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan di bidang penegakan disiplin di Kabupaten Boyolali.

## **Daftar Pustaka**

- Agus Dwiyanto. 2006. *Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Anwar Prabu Mangkunegara. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Edy Sutrisno. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Prenada Media Group.
- H.B.Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Penerapannya Dalam Penelitian*. Surakarta : UNS Press
- Joko Widodo. 2008. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang : Bayumedia
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Sulistyastuti, (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan*

*Aplikasinya di Indonesia,*  
(Yogyakarta: Gava Media).

Ratminto dan Winarsih Atik Septia. 2007.  
*Manajemen Pelayanan.* Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar

Setiyawan, Budi dan Waridin. 2006.  
Pengaruh Disiplin Kerja Karyawan  
Dan Budaya Organisasi Terhadap  
Kinerja Di Divisi Radiologi RSUP  
Dokter Kariadi Semarang. *JRBI* .  
Vol 2. No 2. Hal: 181-198.

Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi  
Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan  
dan. Implementasi.* Bumi Aksara.  
Jakarta.

Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan  
Pengembangan Kompetensi SDM.*  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono.2016. *Metode Penelitian  
Kuantitatif, Kualitatif, dan  
Kombinasi (Mixed Methods).*  
Bandung: Alfabeta